

PEMKAB ACEH BARAT GELAR REMBUK STUNTING 2022 DAN TEKEN KOMITMENT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2023



Sumber gambar: acehherald.com

Meulaboh - Sebagai upaya meningkatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral dalam aksi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Selasa (25-10-2022), menggelar kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 yang di ikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab layanan, maupun sektor/lembaga non-pemerintah hingga masyarakat.

Kegiatan rembuk stunting yang dilaksanakan di aula Bappeda Aceh Barat tersebut di buka langsung oleh Bupati Aceh Barat di wakili Sekretaris Daerah (Sekda), Marhaban., SE., M. Si., dan di hadiri oleh unsur Forkopimda Aceh Barat, para Kepala SKPK, para Camat, Ketua TP PKK Aceh Barat, Ketua IBI dan IDI Aceh Barat, para Kepala Puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, keuchik serta kader desa lokus di lingkup Kabupaten Aceh Barat.

Dalam sambutannya, Sekda Aceh Barat, Marhaban, menyampaikan kegiatan rembuk stunting ini merupakan upaya dalam penentuan arah kebijakan percepatan penurunan stunting tahun 2023 mendatang di Kabupaten Aceh Barat.

Marhaban mengatakan percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional dan isu utama prioritas pemerintah Aceh. Kabupaten Aceh Barat sendiri, telah ditetapkan menjadi salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas tuturnya.

Ia menjelaskan dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Barat saat ini sebesar 27,4%. Pada tahun 2022, terdapat 24 gampong lokasi fokus untuk percepatan penurunan stunting, dan selanjutnya ditetapkan sebanyak

40 gampong lokus pada tahun 2023 sesuai hasil analisis situasi dengan pertimbangan prevalensi, kasus stunting tertinggi dan faktor lainnya di masing-masing gampong paparnya.

Menyikapi hal tersebut, lanjut Marhaban, Pemkab Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada gampong lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dasyat) di gampong Pasi Pinang, dan Rumah Gizi Gampong (RGG) di gampong Lapang ujarnya.

Di samping itu, Pemkab Aceh Barat juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, hingga ke tingkat kecamatan dan gampong yang masing-masing diketuai oleh para camat dan keuchik, dengan turut melibatkan berbagai elemen termasuk tim penggerak PKK terang Marhaban.

"Berbagai upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat menurunkan prevalensi angka stunting Kabupaten Aceh Barat hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN yang di canangkan" kata Marhaban.

Untuk itu, diperlukan sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua pihak guna memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara SKPK dengan seluruh elemen terkait dapat berjalan optimal dan tepat sasaran harapnya.

Marhaban juga meminta kepada para Kepala puskesmas, TPG puskesmas, bidan desa, para keuchik, kader desa lokus stunting serta seluruh elemen terkait lainnya, agar dapat melakukan penelusuran dan pendataan secara akurat terhadap bayi dan balita yang berpotensi mengalami stunting, sehingga mendapat perhatian intensif dan penanganan bersama pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda juga menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting di tahun 2023 mendatang.

Sumber berita:

1. <https://acehbaratkab.go.id/berita/kategori/berita/tingkatkan-sinergitas-dan-kolaborasi-lintas-sektor-pemkab-aceh-barat-lakukan-percepatan-penurunan-stunting>, Selasa, 25 Oktober 2022
2. <https://acehherald.com/pemkab-aceh-barat-gelar-rembuk-stunting-2022-dan-teken-komitment-percepatan-penurunan-stunting-2023>, Rabu, 26 Oktober 2022

Catatan:

- ❖ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹
- ❖ Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada 2021 menjadi 14% pada 2024. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.²
- ❖ Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.³
- ❖ Pemkab Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya melalui penanganan spesifik maupun sensitif, beberapa diantaranya yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pada gampong lokus, membentuk tim pendamping keluarga (TPK), launching dapur gizi atasi stunting (Dasyat) di gampong Pasi Pinang, dan Rumah Gizi Gampong (RGG) di gampong Lapang. Upaya tersebut merupakan pelaksanaan dari strategi

¹ Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1 Angka 1

² <https://www.kemenkopmk.go.id/19-kl-siap-dukung-program-percepatan-penurunan-stunting>

³ Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 13

nasional percepatan penurunan stunting. Strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk⁴ :

- a. Menurunkan prevelensi stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Catatan akhir:

1. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri; adalah kesatuan masyarakat.⁵
2. Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 2 Angka 2

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh, Pasal 1 angka 6

⁶ *Ibid*, Pasal 11